

**ANALISIS RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

IKHLASUL AMAL
NIM: 1705906030025



**FAKULTAS EKONOMI
PRODI AKUNTANSI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2022**

**ANALISIS RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH:

IKHLASUL AMAL
NIM: 1705906030025



**FAKULTAS EKONOMI
PRODI AKUNTANSI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59 Telp.:0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh, 17 Maret 2022

Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Ikhlasul Amal
Nim : 1705906030025

Dengan judul : **Analisis Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Simeulue**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagai dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

Mengesahkan:

Pembimbing

Lilis Marlina, S.E., M.Si
NIP: 198304042010032003

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi

Prof. Dr. T Zulham S.E., M.Si
NIP: 196002121989031003

Ika Rahmadani, S.E., M.Si.Ak
NIDN/NIP. 0013058804



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59 Telp.:0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh, 17 Maret 2022

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Ikhlasul Amal

NIM : 1705906030025

Dengan Judul : **Analisis Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dalam Upaya
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten
Simeulue**

Yang telah dipertahankan didepan komisi Ujian pada 17 Maret 2022.

Menyetujui

Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Lilis Marlina, SE., M.Si.

.....

2. Sekretaris : Said Mahdani, SE., M.Si.Ak

.....

3. Anggota : Fatmayanti, SE., M.Si.

.....

Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi

Ika Rahmadani, S.E., M.Si.Ak
NIDN/NIP. 0013058804

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhlasul Amal

NIM : 1705906030025

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak mendapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Meulaboh, 17 Maret 2022

Yang Menyatakan

Ikhlasul Amal
NIM.1705906030025

PERSEMBAHAN

Ya Allah...

Terima kasih atas kasih dan rahmat-Mu yang agung ini, hari ini hamba Bahagia sebuah perjalanan panjang yang kau berikan untukku agar aku mengerti kata syukur dan terus berusaha untuk menggapai impian. Jadikanlah keberhasilan ini menjadi langkah awal bagiku untuk memenuhi cita-cita.

Ayahanda (Eddy Jasir) dan Ibunda (Nirmanita) tercinta dan tersayang

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga Kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayahanda dan Ibunda, Sebagai wujud terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga anakmu dapat menggapai cita-citanya. Apa yang anakmu dapatkan hari ini, belum dapat membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata kalian. Terima kasih atas segala doa dan dukungan kalian baik dalam bentuk materi maupun dukungan moril.

Abang, Kakak dan Adik-Adikku

Sebagai tanda terima kasih, Ikhlas persembahkan karya kecil ini untukmu saudaraku Mulia Al-Habsy, Almh. Yuni Hidayah Arisma, Wahyudi Gunara, Siti Rahayu dan M. Viqri Qiran. Terima kasih telah menjadi motivator serta penyemangat bagi Ikhlas dalam menjalani pendidikan ini, harapan ikhlas untuk saudaraku semoga segera mengikuti jejak kami menempuh pendidikan yang lebih tinggi dari kami.

Dosen Pembimbing

Kepada Ibu Lilis Marlina, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak atas bantuannya, nasehatnya serta ilmu yang selama ini sudah dilimpahkan kepada saya dengan rasa tulus dan ikhlas sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini

Ikhlasul Amal, SE.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., MBA, selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
- 2) Bapak Prof. Dr. T. Zulham, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
- 3) Ibu Ika Rahmadani, SE., M.Si. Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
- 4) Ibu Sari Maulida Vonna, SE., M.Si. Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
- 5) Ibu Lilis Marlina, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
- 6) Ayahanda (Eddy Jasir), Ibunda (Nirmanita) dan Abang dan Adik-adikku yang telah memberikan bantuan dukungan materi dan moral sehingga pada akhirnya penulis ada pada tahap ini.

7) Sahabat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu

Meulaboh, 17 Maret 2022

Penulis

Ikhlasul Amal
NIM.1705906030025

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Teuku Umar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhlasul Amal
NIM : 1705906030025
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Teuku Umar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Simeulue.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Teuku Umar berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Meulaboh, 17 Maret 2022
Yang Menyatakan

Ikhlasul Amal
NIM.1705906030025

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan untuk mengetahui hubungan antara Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simeulue selama tahun 2014-2019. Dengan variabel bebas yaitu Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan variabel terikat Pendapatan Asli Daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi dan analisis koefisien korelasi *pearson product moment*. Hasil penelitian adalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tahun 2014-2019 memiliki kontribusi yang sangat kurang, dan memiliki hubungan yang sangat kuat atau dengan signifikansi yaitu $0,007 < 0,05$, serta hasil pengujian dan perbandingan nilai hitung t dan nilai tabel t, dengan nilai $5,0604 > 2,1319$, diketahui bahwa terdapat hubungan yang berarti (signifikan) antara retribusi pelayanan kepelabuhanan dengan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study aims to find out how big the contribution is and to find out the relationship between Port Service Retribution on increasing Regional Original Revenue in Simeulue Regency during 2014-2019. With the independent variable, namely Port Service Retribution and the dependent variable is Regional Original Revenue. The analytical method used in this research is contribution analysis and Pearson product moment correlation coefficient analysis. The result of the research is that the Port Service Fee for 2014-2019 has a very low contribution, and has a very strong relationship or with a significance of $0.007 < 0.05$, as well as the results of tests and comparisons of the calculated t value and the t table value, with a value of $5.0604 > 2.1319$, it is known that there is a significant (significant) relationship between port service fees and local revenue.

Keywords: *Port Service Retribution and Local Revenue*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	11
2.1 Kajian Pustaka	11
2.1.1 Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11
2.1.2 Jenis Pendapatan Asli Daerah	13
2.1.3 Retribusi Daerah	15
2.1.4 Jenis-jenis Retribusi Daerah	16
2.1.5 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	18

2.1.6 Hubungan Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah..	19
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Penelitian	23
2.4 Hipotesis.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Desain Penelitian.....	25
3.2 Populasi dan Sampel	26
3.2.1 Populasi	26
3.2.2 Sampel.....	26
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.3.1 Sumber Data.....	26
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	27
3.4 Operasional Variabel.....	27
3.4.1 Variabel Indenpenden	27
3.4.2 Variabel Dependen.....	27
3.5 Metode Analisis.....	28
3.5.1 Analisis Kontribusi.....	28
3.5.2 Analisis Koefisien Korelasi <i>Pearson Product Moment</i>	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Simeulue.....	31
4.1.1 Sejarah Kabupaten Simeulue	31
4.1.2 Letak Geografi.....	32
4.1.3 Iklim dan Cuaca	33
4.1.4 Pemerintahan	33
4.1.5 Transportasi	34
4.2 Hasil Analisis Data.....	35
4.2.1 Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2019	35
4.3.1 Analisis Koefisien Korelasi <i>Pearson Product Moment</i> Penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2019	36

4.4 Pembahasan.....	39
4.4.1 Kontribusi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2019	39
4.4.2 Hubungan Antara Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Dengan Pendapatan Asli Daerah.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	43
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Tahun 2014-2019 (milyar rupiah).....	4
Tabel 1. 2 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue 2014-2019 (milyar rupiah).....	5
Tabel 1. 3 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2019	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah.....	28
Tabel 3. 2 Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi	29
Tabel 4. 1 Hasil Perhitungan Kontribusi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Terhadap Pndapatan Asli Daerah	35
Tabel 4. 2 Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi	37
Tabel 4. 3 Hasil Analisis Koefisien Pearson Product Moment.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	23
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kabupaten Simeulue	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Analisis Kontribusi	48
Lampiran 2 Hasil Analisis Koefisien Korelasi Pearson Product Moment.....	49
Lampiran 3 Biodata.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Aceh merupakan provinsi terujung bagian barat Indonesia yang terletak diujung utara pulau Sumatra dan merupakan Provinsi paling barat di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah di Aceh dengan Otonomi Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dengan adanya tuntutan *Good Governance* dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Mewujudkan konsep *Good Governance* dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan

ekonomi. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengimplementasikan *Good Governance* untuk memperbaiki kinerja dalam menjalankan pemerintahan daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani (Anggara, 2012).

Goods and Services harus mampu disiapkan oleh pemerintah. Arti *Good* dalam *Good Governance* sendiri mengandung dua pengertian. Pertama adalah menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai-nilai yang mampu meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, merupakan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *Good Governance* yaitu: 1) Mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat. 2) Memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian, dan 3) Membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah yang berdampak kepada pengelolaan keuangan daerah. Optimalisasi pemerintahan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber pemerintahan daerah yang dapat

menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (Pazri, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mega dan Inggriani, 2016). Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di peroleh daerah bersangkutan. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka akan menunjukkan semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada pusat. Berdasarkan pada ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga daerah otonom berhak mengatur dan membiayai daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah nantinya diharapkan dapat menjadi opsi utama dalam membiayai rencana kegiatan-kegiatan dan kebutuhan daerah. Apabila Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat penerimaannya maka kemandirian daerah akan semakin baik, Iskandar *et.al* (2013).

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapatkan otonomi khusus dari Pemerintah Pusat. Sebagai daerah yang diberikan otonomi khusus, Aceh juga harus bisa meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Adapun perkembangan pendapatan asli daerah Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Tahun 2014-2019
(milyar rupiah)**

Jenis Pendapatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Asli Daerah	1, 731	1, 986	2, 060	2,276,31	2, 359,39	2, 481,63
Pajak daerah	1, 031	1, 173	1, 253	1, 300	1, 309,08	1, 509,79
Retribusi daerah	4	5	10	10	20,76	28,86
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	134	165	177	228	181,65	196,93
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	563	643	621	689	847,89	746,04

Sumber: aceh.bps.go.id (2021)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa laju peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Aceh terus meningkat selama lima tahun terakhir, dari 1,7 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 2,4 triliun rupiah pada tahun 2019. Realisasi PAD Pemerintah Provinsi Aceh terus meningkat setiap tahunnya, dari 1,98 triliun rupiah pada tahun 2015 menjadi 2,48 triliun rupiah pada tahun 2019. Angka tersebut tergolong rendah, dikarenakan kontribusi PAD terhadap APBA masih di bawah angka 25 persen (BPS Aceh, 2021) Artinya, Pemerintah Provinsi Aceh masih sangat bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Keumala *et.al*, 2020), menyatakan tingkat kemandirian Pemerintah Aceh masih rendah, hal ini di

sebabkan masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

Kabupaten Simeulue adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat, menerapkan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kabupaten Simeulue sebagai salah satu daerah otonom memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Sebab Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur kemampuan daerah dalam membiayai urusan rumah tangga yang dapat dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue 2014-2019 (milyar rupiah)

Jenis pendapatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Asli Daerah	33, 452	44, 291	45, 301	57, 731	57, 510	72, 886
Pajak daerah	3, 167	3, 732	5, 722	9, 130	6, 880	7, 439
Retribusi daerah	1, 272	3, 938	1, 603	1, 918	1, 714	1, 620
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang	2, 769	1, 882	4, 128	4, 201	4, 225	4, 505

dipisahkan						
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	26, 242	34, 738	33, 874	42, 481	44, 689	59, 320

Sumber: *aceh.bps.go.id (2021)*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Simeulue terus meningkat selama lima tahun terakhir, dari 37,5 milyar rupiah pada tahun 2014 menjadi 65,5 milyar rupiah pada tahun 2019. Terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue mengalami peningkatan walaupun pertumbuhannya tidak begitu besar.

Faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi daerah adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar iuran retribusi, begitu juga pengelolaan yang dilakukan terhadap retribusi pelayanan kepelabuhanan yang belum maksimal. Kondisi kinerja pelayanan pelabuhan di Kabupaten Simeulue menunjukkan efektifitas dan efisiensi pelayanan yang belum maksimal, seperti sering terjadinya keterlambatan keberangkatan kapal, sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga berdampak pada kinerja pengelolaan pelabuhan tersebut serta secara tidak langsung berdampak juga pada penerimaan pendapatan retribusi daerah.

Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Simeulue, sebagai salah satu simpul jaringan transportasi, merupakan pintu gerbang perekonomian kawasan. Di samping itu, pelabuhan ini juga menjadi penunjang utama keluar masuk barang hasil kekayaan alam maupun barang-barang pokok dari luar daerah serta kunjungan pariwisata ke kepulauan Simeulue. Dengan adanya pelabuhan ini tentu

pemerintah ikut berperan dalam menyediakan serta mengelola fasilitas yang ada di lingkungan pelabuhan. Agar pelayanan di pelabuhan dapat berjalan dengan lancar, aman dan cepat, pemerintah melakukan kebijakan dengan menarik pembayaran atas pelayanan jasa yang diberikan yang kemudian disebut dengan retribusi pelayanan kepelabuhanan. Dengan adanya retribusi pelayanan kepelabuhanan ini diharapkan turut membantu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dimana tujuan akhirnya tentu adalah untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan laut merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Simeulue untuk memperbesar pendapatan asli daerah maka pemerintah perlu menata dan memfasilitasi pelabuhan laut agar dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi (Daud dan Marini, 2017). Data retribusi pelayanan pelabuhan di kabupaten simeulue dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 3 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2019

Tahun	Pendapatan Retribusi Pelabuhan di Kabupaten Simeulue	Pertumbuhan (%)
2014	335.050.333	-
2015	391.052.800	0,167%
2016	398.648.905	0,019%
2017	447.038.235	0,121%
2018	494.902.060	0,107%
2019	493.013.370	0,004%

Sumber: BPKD Kab.Simuelue (2021)

Berdasarkan data di atas retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam kaitan penggalian sumber-sumber retribusi daerah, khususnya retribusi pelayanan kepelabuhan yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah, adalah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah walaupun belum seperti yang diharapkan dari potensi daerah yang dimiliki.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rifurariani *et.al* (2020), Hasil analisis menunjukkan bahwa retribusi pelabuhan adalah salah satu sumber PAD bagi Kota Sorong dan memberikan kontribusi cukup besar. Mader (2018), menyatakan bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan hanya memberikan kontribusi sebesar 19,5%, sedangkan 80,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang artinya adanya sumber yang lebih besar yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulungan selama tahun 2007-2013. Daud *et.al* (2017), menyatakan bahwa Jumlah penumpang kapal penyeberangan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan retribusi pelayanan pelabuhan laut sebagai bagian dari penambahan pendapatan daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Rifurariani *et.al* (2020), tentang analisis retribusi pelabuhan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Sorong. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifurariani *et.al* (2020) adalah sama-sama meneliti tentang analisis retribusi pelayanan kepelabuhanan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Lokasi penelitian Rifurariani *et.al* (2020), di

pelabuhan laut penyeberangan kapal penumpang dan kapal barang yang berada di Kota Sorong, Papua.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan pada pelabuhan penyeberangan penumpang yang berada di Kabupaten Simeulue. Rendahnya penerimaan pendapatan retribusi daerah dibanding dengan pendapatan lainnya, dengan demikian pemungutan retribusi daerah di kabupaten simeulue masih perlu di tingkatkan. Berdasarkan fenomena yang di kemukakan di atas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simeulue”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar kontribusi retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Simeulue?”
2. Apakah terdapat hubungan positif antara retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Simeulue?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi pelayanan Kepelabuhanan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui hubungan antara retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Simeulue?

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam analisis tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan dan pendapatan asli daerah di kabupaten simeulue.
2. Di harapkan penelitian ini sebagai sumber referensi serta dapat menambah literatur pada perpustakaan sehingga memberi manfaat bagi pembaca.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai kontribusi retribusi daerah/retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap pembangunan daerah demi menunjang perekonomian daerah, khususnya Kabupaten Simeulue.
2. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
3. Melakukan penelitian ini menjadi bahan masukan dan pembelajaran serta dapat menyadari bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan memiliki peran dalam pendapatan asli daerah dan pembangunan ekonomi daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Widiartini (2014:28) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil daerah lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Rooy dan Budiarmo (2015), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, Ersita dan Elim (2016).

Sedangkan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan pengertian dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberi keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Aceh yang selanjutnya disingkat PAA adalah semua penerimaan Aceh yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan milik Aceh, zakat, infaq dan lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa kinerja keuangan daerah dikatakan lemah apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap kebutuhan pembiayaan sangat minim. Namun sebaliknya, jika kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak didanai dari Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah tersebut kuat. Oleh sebab itu, dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berlanjut diperlukan suatu langkah optimalisasi penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah yang dimaksud disini tidak lain adalah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah yang dimana nantinya dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah tersebut. Hal ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Berdasarkan definisi yang di kemukakan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segala bentuk penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

2.1.2 Jenis Pendapatan Asli Daerah

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebut bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

1. Pajak Daerah

Hasil Pajak Daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang di transfer langsung ke kas daerah, Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPD.

2. Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah adalah komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan

jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan Penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan Bunga.
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, Potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas maka komponen PAD dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah maupun retribusi daerah.

2.1.3 Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah, Ersita dan Elim (2016). Menurut Siahaan (2010:5) menyatakan bahwa Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Menurut Munawir (2011:85) retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat di tunjuk. Menurut windhu (2018: 185) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo (2017:108) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Retribusi Daerah pungutan didaerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang di sediakan pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan tertentu. Subjek atau wajib pribadi adalah orang pribadi atau badan yang terlibat atas pembayaran terhadap penggunaan jasa atau perizinan dari pemerintah daerah tersebut, termasuk pemungut atau pemotong retribusi daerah. Retribusi daerah nantinya akan menjadi penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Aceh sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

2.1.4 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 golongan, menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 108 ayat 2 - 4 yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan.
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
- d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- e. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- f. Retribusi pasar.
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- k. Retribusi pengelolaan limbah cair.

- l. Retribusi pelayanan tera ulang.
- m. Retribusi pelayanan pendidikan.
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha terdiri

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- b. Retribusi pasar grosir/pertokoan.
- c. Retribusi tempat pelelangan.
- d. Retribusi terminal.
- e. Retribusi tempat parkir khusus.
- f. Retribusi tempat penginapan/persinggahan/villa.
- g. Retribusi rumah potong hewan.
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan.
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- j. Retribusi penyeberangan diatas air.
- k. Retribusi penjualan produk usaha daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan.
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- c. Retribusi izin gangguan.
- d. Retribusi izin trayek.
- e. Retribusi izin usaha perikanan.

2.1.5 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan dalam berlayar, tempat perpindahan intri dan atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan ruang wilayah.

Menurut Lasse (2014:4) pelabuhan diartikan juga sebagai area tempat kapal dapat melakukan kegiatan pemuatan atau pembongkaran kargo, termasuk dalam area dimaksud suatu lokasi dimana kapal dapat antri menunggu giliran atau tunggu perintah aktivitas. Dapat pula diartikan sebagai terminal dan area dimana kapal-kapal memuat atau membongkar muatan di dermaga, di lokasi labuh, di bui pelampung atau sejenisnya dan mencangkup perairan tempat menunggu giliran mendapatkan pelayanan. Menurut Sasono (2012:49) pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat transportasi.

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009, pelabuhan adalah tempat terdirinya atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pengusaha yang dipergunakan sebagai tempat bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar buat barang, berupa terminal dan tempat berlabu kapal yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan

dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra atau antar moda transportasi.

Peraturan Daerah yang di keluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beserta Bupati Kabupaten Simeulue, Qanun Daerah No. 27 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi pelayanan kepelabuhan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan dimiliki, dan di kelola oleh pemerintah daerah (Mader, 2018).

Dari definisi di atas disimpulkan bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pendapatan yang di peroleh dari pungutan pengguna jasa kepelabuhanan yang di sediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi pelayanan kepelabuhan tersebut kemudian akan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.1.6 Hubungan Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai peranan cukup besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi pendapatan asli daerah. Daerah mempunyai kewenangan dalam memungut semua jenis retribusi daerahnya. Peran serta masyarakat dalam

membayar retribusi sangat diharapkan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, adanya hubungan antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan (Usman, 2015).

Retribusi Daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu retribusi daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat besar. Hasil penelitian Asyraf *et.al* (2019) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, karena peranan retribusi daerah sangat penting untuk sumbangan keuangan daerah sehingga bias digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi suatu acuan dasar dalam melakukan penelitian, sehingga memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rifurariani et.al (2020)	Analisis Retribusi pelabuhan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif	Untuk mengetahui tingkat penerimaan retribusi pelabuhan dalam meningkatkan PAD Kota Sorong.	Menunjukkan bahwa retribusi pelabuhan adalah salah satu sumber PAD bagi Kota Sorong dan memberikan kontribusi cukup besar dan sudah dapat melayani 4 (empat) pelayanan domestik dan 1 (satu) pelayanan internasional
2	Mader (2018)	Pengaruh Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulungan Tahun 2007-2019	Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana	Untuk mengetahui besarnya pengaruh retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bulungan tahun 2007-2019	Menunjukkan bahwa Retribusi pelayanan kepelabuhanan memiliki hubungan yang sedang dengan Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi pelayanan kepelabuhanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
3	Fitri (2021)	Kontribusi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis	Penelitian ini menggunakan Data kuantitatif	Untuk menghitung penerimaan dan kontribusi jasa pelabuhan serta hambatan atau kendala dan upaya peningkatan penerimaan retribusi jasa pelabuhan.	Menunjukkan bahwa Penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhanan Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kontribusi retribusi jasa pelabuhan rata-rata 73,32% pertahun tergolong kriteria sangat baik.

4	Christy (2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2016-2018	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Deskriptif	Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak hiburan, retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan Periode 2016-2018	Menunjukkan bahwa Pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah
5	Rohimah (2014)	Pengaruh retribusi parkir, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi izin trayek, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tanjungpinang	Penelitian ini menggunakan metode pengujian asumsi klasik	Untuk mengetahui pengaruh retribusi parkir, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi ijin trayek, retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tanjungpinang.	Menunjukkan bahwa retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, retribusi pengujian kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, retribusi izin trayek berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi pelayanan kepelabuhanan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tanjungpinang.
6	Daud, dan Marina (2017)	Analisis Jumlah Penumpang Kapal Penyeberangan Ulee Lheue Terhadap Penerimaan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis data yang digunakan	Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara jumlah penumpang kapal penyeberangan	Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara jumlah penumpang kapal penyeberangan terhadap

		Retribusi Pelabuhan Kota Banda Aceh	adalah analisis regresi sederhana.	terhadap penerimaan retribusi pelabuhan laut Kota Banda Aceh	penerimaan retribusi pelabuhan laut Kota Banda Aceh
--	--	-------------------------------------	------------------------------------	--	---

2.3 Kerangka Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Gambar diatas, penulis ingin mengkaji dan melihat seberapa besar penerimaan Retribusi Daerah dan seberapa besar kontribusi Retribusi Pelayanan kepelabuhanan terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD).

2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan rumusan masalah, tujuan penelitian serta kerangka pemikiran, maka disusun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Di duga bahwa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan memiliki kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simeulue.

2. Di duga bahwa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan memiliki hubungan yang positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simeulue.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

1. Jenis Investigasi

Jenis investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kausalitas, dalam studi ini peneliti tidak memiliki intervensi dalam penelitian, karena peneliti menganalisis hubungan retribusi pelayanan kepelabuhanan (X) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kabupaten Simeulue.

2. *Setting* Penelitian

Setting penelitian adalah lingkungan, tempat atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk di jadikan sebagai objek penelitian. Lokasi untuk penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Simeulue.

3. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu retribusi pelayanan kepelabuhanan dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Simeulue.

4. Horison Waktu

Horison waktu dalam penelitian ini adalah *time series* yaitu studi yang datanya diperoleh dari amatan satu objek dari beberapa periode waktu.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Sugiyono (2011) menyatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka populasi dalam penelitian ini adalah retribusi pelayanan kepelabuhanan Kabupaten Simeulue.

3.2.2 Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2017:85) teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini jumlah retribusi daerah/retribusi pelayanan kepelabuhanan Kabupaten Simeulue.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah ada dan tersedia baik dibuku-buku litelatur ataupun sumber-sumber lain. Data yang di perlukan dalam penelitian ini berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simeulue. Sumber data penelitian ini di peroleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Simeulue, BPS Provinsi Aceh, dan BPS Kabupaten Simeulue.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik Dokumentasi. Menurut Sugiyono (2015:329) Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

3.4 Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Independen

Menurut (Sugiyono, 2016:36) “variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (X). Retribusi pelayanan kepelabuhanan yang adalah pembayaran atas jasa pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan dimiliki, dan di kelola oleh pemerintah daerah (Mader: 2018), dan diukur dengan skala rasio.

3.4.2 Variabel Dependen

Menurut (Sugiyono, 2016:69) “Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Variabel Dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang di peroleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Mardiasmo 2002:132), dan diukur dengan skala rasio.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Kontribusi

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan, (Handoko, 2013). Analisis kontribusi retribusi pelayanan kepelabuhanan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap pendapatan asli daerah, (Handoko, 2013).

Rumus perhitungan kontribusi:

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{realisasi penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhanan}}{\text{realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

3.5.2 Analisis Koefisien Korelasi *Pearson Product Moment*

Menurut Sugiyono (2017:224) Koefisien korelasi merupakan angka hubungan kuatnya antara dua variabel atau lebih. Menurut Sugiyono (2017:228) Koefisien korelasi product moment merupakan teknik korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data dari dua variabel atau tersebut adalah sama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan persamaan koefisien korelasi product moment karena data yang memiliki skala ukur rasio.

Tabel 3. 2 interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Besar kecilnya koefisien korelasi yang telah dihitung serta kuat lemahnya tingkat keeratan hubungan antara variabel X dan variabel Y, tidak memiliki arti apapun apa belum dilakukan yang sudah dihitung/diperoleh. Dengan demikian, pengujian koefisien korelasi dilakukan untuk mengetahui berarti atau tidaknya hubungan antara variabel-variabel yang diteliti hubungannya.

Pengujian koefisien korelasi dapat dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah pengujian hipotesis berikut:

1. Menentukan rumusan hipotesis statistik yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

$H_0 : p = 0$, artinya tidak ada hubungan antara retribusi pelayanan kepelabuhanan dengan pendapatan asli daerah.

$H_1 : p \neq 0$, artinya ada hubungan antara retribusi pelayanan kepelabuhanan dengan pendapatan asli daerah.

2. Menentukan dan menghitung nilai uji statistik yang digunakan. Dalam analisis korelasi sederhana uji statistik yang digunakan adalah uji t, dengan rumus:

$$t = r = \frac{\sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

3. Membandingkan nilai uji t terhadap nilai tabel t dengan kriteria pengujian:
Jika nilai uji t lebih besar atau sama dengan (=) nilai tabell t, maka hipotesis nol (H_0) ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Simeulue

4.1.1 Sejarah Kabupaten Simeulue

Ibu Kota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang, kalau diucapkan dengan logat daerah adalah *Si Navang* yang berasal dari legenda Navang. Navang adalah si pembuat garam masa dulu di daerah Babang (pintu masuk teluk Sinabang). Dulunya Navang membuat garam dengan membendung air laut yang masuk ke pantai Babang, kemudian dikeringkan lalu menjadilah garam. Garam Navang lambat laun menjadi dikenal di sekitar Ujung Panarusan sampai ke Lugu. Jika penduduk membutuhkan garam, maka mereka akan menuju si Navang, yang lambat laun konsonan 'V' pada Navang berubah menjadi Nabang. Sementara Sibigo ibu kota kecamatan Simeulue Barat berasal dari kata/kalimat *CV dan Co* karena masa-masa penjajahan dulu, Sibigo adalah lokasi perusahaan pengolahan kayu Rasak sejenis kayu sangat keras setara dengan Jati yang dikirim ke Belanda via laut.

Presiden Republik Indonesia Bapak H. Mohammad Soeharto pada tanggal 13 Agustus 1996 menandatangani PP 53 tahun 1996 tentang peningkatan status wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi Kabupaten Administratif Simeulue. Selanjutnya pada tanggal 27 September 1996 bertempat di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Kabupaten Administratif Simeulue diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Yogie S. Memet sekaligus melantik Drs. H. Muhammad

Amin sebagai Bupati Kabupaten Administratif Simeulue. Melalui UU No. 48 Tahun 1999 lahirlah Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireun sebagai Kabupaten Otonom dalam khazanah Pemerintahan Indonesia. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ad Interim Faisal Tanjung meresmikan lahirnya Kabupaten Simeulue dan tanggal inilah yang dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Simeulue yang setiap tahunnya diperingati.

4.1.2 Letak Geografi

Kabupaten Simeulue beribukota Sinabang terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Aceh, berjarak 105 Mil laut dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, atau 85 Mil Laut dari Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, serta berada pada koordinat 2015' - 2055' Lintang Utara dan 95040' - 96030' Bujur Timur (Peta Rupa Bumi skala 1:250.000 oleh Bakosurtanal).

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kabupaten Simeulue



Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri 147 pulau besar dan kecil. Luas keseluruhan Kabupaten Simeulue adalah 1.838,09 Km² atau 183.809 Ha. Pulau yang terbesar adalah Pulau Simeulue. Selain Pulau Simeulue terdapat pulau-pulau lainnya yaitu Pulau Siumat, Pulau. Panjang, Pulau Batu Berlayar, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langeni, Pulau Linggam, Pulau Leukon, Pulau Silaut Besar & Pulau Silaut Kecil (terluar), Pulau Tepi, Pulau Ina, Pulau Alafulu, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khalak-khalak, Pulau Asu, Pulau Babi, Pulau Lasia dan pulau-pulau kecil lainnya. Kepulauan ini dikelilingi oleh Samudera Indonesia dan berbatasan langsung dengan perairan internasional.

4.1.3 Iklim dan Cuaca

Selama tahun 2018 curah hujan di wilayah Simeulue mencapai 3.284,5 mm/tahun dan hari hujan sebanyak 280 hari. Keadaan cuaca ditentukan oleh penyebaran musim. Pada musim barat yang berlangsung sejak bulan September hingga Februari, sering terjadi hujan yang disertai badai dan gelombang besar sehingga sangat berbahaya bagi pelayaran. Sedangkan pada musim timur yang berlangsung sejak bulan Maret sampai Agustus, biasanya terjadi kemarau yang diselingi hujan yang tidak merata serta keadaan laut yang relatif tenang.

4.1.4 Pemerintahan

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang resmi dibentuk pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. Sebelumnya, secara administratif Kabupaten Simeulue adalah bagian dari wilayah

Kabupaten Aceh Barat. Kota Sinabang merupakan Ibu Kota dan sekaligus pusat pemerintahan dari Kabupaten Simeulue.

Sejak awal berdiri, Kabupaten Simeulue memiliki 5 (Lima) kecamatan. Lalu pada tahun 2002 terjadi pemekaran pada beberapa kecamatan sehingga jumlahnya berkembang menjadi 8 (Delapan). Dan selanjutnya pada tahun 2012 berkembang lagi menjadi 10 (Sepuluh) kecamatan. Dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Teupah Tengah sebagai pecahan dari Kecamatan Simeulue Timur dan Kecamatan Simeulue Cut sebagai pecahan dari Kecamatan Simeulue Tengah.

Seiring berjalannya waktu, banyak hal yang berkembang di Kabupaten Simeulue khususnya dari sisi pemerintahan. Pada tahun 2017 setelah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terpilihlah pasangan Erly Hasyim dan Afridawati Darmili sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue periode 2017-2022. Sedangkan Ketua DPRK masih dijabat oleh Murniati, SE setelah pemilihan Anggota DPRK tahun 2014 yang lalu, sekarang ketua DPRK dijabat oleh Irwan Suharmi, SE.,M.Si melalui pemilihan anggota DPRK pada tahun 2019.

4.1.5 Transportasi

Angkutan darat, angkutan udara, dan angkutan sungai dan laut memiliki peran penting dalam mendukung transportasi di Kabupaten Simeulue. Untuk memenuhi transportasi darat tersedia kendaraan angkutan yakni kendaraan bermotor. Sedangkan angkutan udara di Kabupaten Simeulue dapat di gambarkan melalui arus penerbangan dari bandara Lasikin yang terletak di kecamatan Teupah Tengah.

Selain angkutan darat dan udara, angkutan laut juga mempunyai peranan penting dalam mendukung transportasi di Kabupaten Simeulue. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Simeulue yang jauh dari daratan pulau Sumatra, dan dihubungkan dengan arus lalu lintas kapal barang maupun kapal penumpang melalui pelabuhan penyeberangan yang ada di Kabupaten Simeulue.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2019

Kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya bagian dari retribusi pelayanan kepelabuhanan yang merupakan sumbangan dari pos retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 4. 1 Hasil Perhitungan Kontribusi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Kriteria
2014	335.050.333	33.452.301.732	0,010%	Sangat Kurang
2015	391.052.800	44.291.838.476	0,0089%	Sangat Kurang
2016	398.648.905	45.301.480.625	0,0088%	Sangat Kurang
2017	447.038.235	57.571.579.185	0,0078%	Sangat Kurang
2018	494.902.060	57.510.412.874	0,0086%	Sangat Kurang
2019	493.013.370	72.886.984.636	0,0067%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2021

Menurut tabel 4.1 Pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 0,010% kemudian tahun 2015 kontribusi mengalami peningkatan sebesar 0,0089% dan

pada tahun 2016 kontribusi mengalami penurunan sebesar 0,0088%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 0,0078% dan tahun 2018 kontribusi mengalami peningkatan sebesar 0,0086%. Kemudian pada tahun 2019 kontribusi mengalami penurunan sebesar 0,0067%. Artinya indikator penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2014-2019 berada pada kriteria sangat kurang. Jadi dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pelayanan kepelabuhanan tiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini dikarenakan total penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ini tidak sebanding dengan realisasi pendapatan asli daerah, karena realisasi pendapatan asli daerah dari sisi penekanan penerimaan pendapatan daerah yang lainnya mengalami peningkatan tiap tahunnya dari aspek pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sementara, retribusi pelayanan kepelabuhanan ini masih sangat rendah dibandingkan dengan penerimaan sektor pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

4.3.1 Analisis Koefisien Korelasi *Pearson Product Moment* Penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2019

Untuk mengetahui hubungan retribusi pelayanan kepelabuhanan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Simeulue, maka dilakukan analisis Koefisien korelasi *product moment*. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat korelasi signifikansi antara variabel bebas retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap variabel terikat pendapatan asli daerah Kabupaten Simeulue.

Tabel 4. 2 Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Tabel 4. 3 Hasil Analisis Koefisien Pearson Product Moment

Correlations			
		RPK	PAD
RPK	Pearson Correlation	1	.930**
	Sig. (2-tailed)		.007
	N	6	6
PAD	Pearson Correlation	.930**	1
	Sig. (2-tailed)	.007	
	N	6	6
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).			

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2021

Berdasarkan hasil analisis korelasi dengan perbandingan tabel 4.2 dan tabel 4.3 diatas menunjukkan angka koefisien korelasi *Pearson product moment* retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar 0,930**. Artinya besarnya korelasi atau hubungan antara variabel retribusi pelayanan kepelabuhanan dengan pendapatan asli daerah ialah sebesar 0,930** (mendekati angka 1) sehingga hubungan retribusi pelayanan kepelabuhanan dengan pendapatan asli daerah sangat kuat atau dengan signifikansinya yaitu $0,007 < 0,05$ dengan demikian

terdapat hubungan atau korelasi yang sangat kuat antara retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap pendapatan asli daerah. Sesuai dengan hasil analisis, koefisien korelasi retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap pendapatan asli daerah bernilai positif yaitu 0,930** maka korelasi kedua variabel bersifat searah. Artinya jika retribusi pelayanan kepelabuhanan tinggi maka pendapatan asli daerah juga tinggi.

Pengujian keberartian koefisien korelasi dapat dilakukan dengan Menentukan dan menghitung nilai uji statistik yang digunakan. Dalam analisis korelasi sederhana uji statistik yang digunakan adalah uji t, dengan rumus:

$$t = r = \frac{\sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Berdasarkan rumus uji diatas, maka nilai hitung t adalah:

Diketahui:

N = 6 dan r = 0,930 sehingga diperoleh nilai hitung t =

$$t = r = \frac{\sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}} = 0,930 \frac{\sqrt{6-2}}{\sqrt{1-(0,930)^2}} = 5,0604$$

Membandingkan nilai uji t nilai tabel t, diketahui nilai hitung t sebesar 5,0604 dan nilai tabel t 2,1319. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, jika kita bandingkan, terlihat nilai hitung t lebih besar dari nilai tabel t atau $5,0604 > 2,1319$. Dengan demikian hipotesis nol yang menyatakan: “Tidak ada hubungan antara retribusi pelayanan kepelabuhanan dengan pendapatan asli daerah” ditolak.

4.4 Pembahasan

Pembahasan ini merupakan hasil penelitian terhadap kesesuaian teori, pendapat, maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya. Penelitian ini mengenai pengaruh retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap pendapatan asli daerah, dapat dibuat pembahasan sebagai berikut:

4.4.1 Kontribusi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2019

Hasil pengujian variabel retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap pendapatan asli daerah menggunakan analisis kontribusi, dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi pelayanan kepelabuhanan tidak memiliki kontribusi atau pengaruh yang signifikan karena berada pada kriteria sangat kurang terhadap penerimaan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Simeulue tahun 2014 – 2019, tetapi tetap berpengaruh positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Dari hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi pelayanan kepelabuhan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Simeulue tahun 2014-2019 memiliki kontribusi sangat kurang. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dengan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan dengan cara mencari, menggali sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pemerintah Provinsi Aceh ikut andil mendukung dengan menambah armada kapal penyeberangan untuk lintasan barat selatan Aceh ke pulau Simeulue, seperti kapal Aceh hebat 1 dan Aceh hebat 3. Pemerintah Kabupaten Simeulue juga menambah rute lintasan penyeberangan baru yaitu Calang-Sinabang atau sebaliknya dan

Meulaboh-Sinabang atau sebaliknya, guna untuk meningkatkan arus keluar masuk barang dan wisatawan untuk berkunjung ke pulau Simeulue.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Silvani (2016) yang mendapatkan hasil bahwa kontribusi retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan untuk peningkatan pendapatan asli daerah masih sangat kecil, dikarenakan setiap tahunnya realisasi dari pencapaian target berkisar 30-60% setiap tahunnya. Rohima (2014) yang mendapatkan hasil bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan belum memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang. Begitu dengan penelitian yang dilakukan oleh Dini (2016) yang menyatakan bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan belum memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bintan periode 2010-2014.

Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Rifurariani *et.al* (2020) hasil analisis menunjukkan bahwa retribusi pelabuhan adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Kota Sorong dan memberikan kontribusi cukup besar. Penelitian yang dilakukan Mader (2018), membuktikan bahwa kontribusi retribusi pelayanan kepelabuhanan hanya memberikan kontribusi sebesar 19,5%, sedangkan 80,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang artinya adanya sumber yang lebih besar yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulungan selama tahun 2007-2013. Fitri (2021) menyatakan bahwa penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhanan Kabupaten Bengkalis memiliki kontribusi retribusi pelayanan kepelabuhanan rata-rata sebesar 73,32% pertahun digolongkan kriteria sangat baik.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Daud *et.al* (2017), menyatakan bahwa Jumlah penumpang kapal penyeberangan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan retribusi pelayanan pelabuhan laut sebagai bagian dari penambahan pendapatan daerah. Implikasi hasil penelitian ini membuktikan bahwa kontribusi retribusi pelayanan kepelabuhanan sangat penting dikelola dengan baik karena memiliki pengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah.

4.4.2 Hubungan Antara Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dengan Pendapatan Asli Daerah

Hasil analisa dengan menggunakan korelasi *pearson product moment* diketahui bahwa terbukti memiliki hubungan antara retribusi pelayanan kepelabuhanan yang sangat kuat dengan pendapatan asli daerah dengan korelasi sebesar 0,930** dan signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$. Sesuai dengan hasil analisis, koefisien korelasi retribusi pelayanan kepelabuhanan bernilai positif yaitu 0,930** maka korelasi kedua variabel bersifat searah. Artinya jika retribusi pelayanan kepelabuhanan tinggi maka pendapatan asli daerah juga tinggi.

Berdasarkan hasil pengujian dan perbandingan nilai hitung t dan nilai tabel t, dengan nilai $5,0604 > 2,1319$, dengan demikian hipotesis nol yang menyatakan: “Tidak ada hubungan antara retribusi pelayanan kepelabuhanan dengan pendapatan asli daerah” ditolak, diketahui bahwa terdapat hubungan yang berarti (signifikan) antara retribusi pelayanan kepelabuhanan dengan pendapatan asli daerah.

Retribusi pelayanan kepelabuhanan memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah. Dengan kebijakan yang di ambil pemerintah Kabupaten Simeulue yang berdasarkan Qanun No. 27 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan, dengan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan di sektor pelabuhan guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Hubungan sangat kuat, dikarenakan retribusi pelayanan kepelabuhanan merupakan bagian dari retribusi daerah, dimana retribusi daerah adalah komponen pendapatan asli daerah. Jika penerimaan pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhanan meningkat, maka secara tidak langsung retribusi daerah dan pendapatan asli daerah juga meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Christy *et.al* (2020) menyatakan bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan memiliki nilai sebesar 0,871, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara pendapatan asli daerah dengan retribusi pelayanan kepelabuhanan di Kabupaten Bintan selama periode 2016-2018. Penelitian yang dilakukan Mader (2018) yang menyatakan bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan memiliki hubungan yang sedang dengan pendapatan asli daerah dengan nilai koefisien korelasi (r) yaitu 0,449 atau 44,9% di Kabupaten Bulungan tahun 2007-2013. Rusdiansyah (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh retribusi di pelabuhan kayan 2 bersifat positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bulungan, Artinya apabila retribusi di pelabuhan kayan 2 mengalami peningkatan maka pendapatan asli daerah Kabupaten Bulungan juga mengalami kenaikan demikian juga sebaliknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Analisis Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simeulue, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hasil analisis menunjukkan bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Simeulue dan memberikan kontribusi yang masih sangat kurang. Hasil pengujian menggunakan analisis kontribusi, dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi pelayanan kepelabuhanan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Simeulue tahun 2014 – 2019, tetapi tetap berpengaruh positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.
2. Berdasarkan hasil analisa hubungan antara retribusi pelayanan kepelabuhanan dengan pendapatan asli daerah dengan korelasi sebesar 0,930** dan signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$. Sesuai dengan hasil analisis, koefisien korelasi retribusi pelayanan kepelabuhanan bernilai positif yaitu 0,930** maka korelasi kedua variabel bersifat searah. Artinya jika retribusi pelayanan kepelabuhanan tinggi maka pendapatan asli daerah juga tinggi. Berdasarkan hasil pengujian dan perbandingan nilai hitung t dan nilai tabel t, dengan nilai $5,0604 > 2,1319$, diketahui bahwa terdapat

hubungan yang berarti (signifikan) antara retribusi pelayanan kepelabuhan dengan pendapatan asli daerah.

5.2 Saran

1. Untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan retribusi pelayanan pelabuhan laut maka tahun berikutnya Kabupaten Simeulue perlu meningkatkan ekstensifikasi pelabuhan penyeberangan Simeulue, sehingga akan memperbesar pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan anggaran pembangunan daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu meningkatkan kerja sama dengan masyarakat sekitar menjaga fasilitas dan kelestarian pelabuhan dengan cara menjaga kebersihan wilayah pelabuhan sekitarnya agar pengunjung lebih nyaman berada disekitar pelabuhan tersebut serta meningkatkan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel ataupun mengganti variabel dengan sumber pendapatan daerah yang lainnya serta menambah sampel ataupun periode penelitian agar memperoleh hasil yang lebih baik dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyraf, A. Said I, M. Mustari. (2019). Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. <http://aceh.bps.go.id> di akses pada tanggal 3 Juni 2021.
- Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Simeulue Tahun 2021.
- Christy K, Br Marbun. Razak, F. Adel, JF. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintang Periode 2016-2018.
- Daud, M. dan Marini, Y. (2017). Analisis Jumlah Penumpang Kapal Penyeberangan Ulee Lheue terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kota Banda Aceh. *Jurnal Humaniora*, 1(2), 99-108 Oktober 2017.
- Elka, D. (2005). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD dan Komponen PAD Provinsi Jawa Barat. hlm.2.
- Ersita, M Dan Elim, I. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sulawesi 10 Utara. *Jurnal EMBA. Vol.4 No.01, Hal. 889-897, Diakses pada 23 November 2018, dari ejournal.unsrar.ac.id.*
- Fitri, Harisa. (2021). Kontribusi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko P, Sri. (2013). Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak, Diakses pada tanggal 16 September 2021 dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1361>
- Iskandar D, T. Hamzah, A. dan Nasir, M. (2013). Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh.
- Keumala U. A., Dedy, Sisca, Agustina, dan Josi (2020). Tingkat Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Aceh Setelah Revisi UU Otonomi Daerah. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>.
- Nurmia. Nur, F. dan Burhanudin. (2018). Kontribusi Terminal Petikemas Palaran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.
- Mader, Peri (2018). Pengaruh Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Skripsi) Universitas Kaltara.

- Maharani P Sari (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Dalam 7 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. (Skripsi) Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Maharani D, D. (2016). Pengaruh Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan Periode 2010-2014.
- Marihot, S. P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Muhiddin. S. A. Dan Abdurahaman. M. (2009). *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian*. Bandung: CV.Pustaka Video
- Muhtarom, A. (2015). Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015. *JurnalEKBIS/Vol.XIII/No/1//edisi Maret 2015*
- Munawir. (2011). Analisis Laporan Keuangan. Edisi kesebelas. Yogyakarta: Liberti.
- Panggabean, H. E. (2009). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Toba Samosir.Skripsi. hlm.33.
- Pazri, M. (2016). Implementasi Prinsip Goodd Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 2, September 2016*.
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah
- Qanun Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan Kepelabuhanan
- Republik Indonesia Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Republik Indonesia Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Regina Usman, (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015).
- Rudiansyah. (2013). Analisis pengaru retribusi pelayanan kepelabuhanan kayan 2 terhadap peningkatan PAD Kabupaten Bulungan.

- Rohima, R. (2014). Pengaruh Retribusi Parkir, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Pelayanan kepelabuhanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang.
- Rooy, De Freddy dan Budiarmo, Novi. (2015). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Raja Ampat.
- Sahya A. (2012). Ilmu Administrasi Negara kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance, Pustaka setia, Bandung, 2012, Cet Ke-1, hlm.209.
- Sirry, L (2020). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendaptan asli daerah Kota Surabaya. (Skripsi) Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Silvani. (2016). Implementasi Perda no 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan di Kepulauan Meranti. Universitas Riau.s
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Welyoyo, Ingriani dan Meily Y.B. (2020). Analisis retribusi pelabuhan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. *Indonesia Accounting Journal Volume 2, Number 2, Year 2020*.
- Widiartini, Ketut. (2014). Otonomi Daerah. Universitas Pendidikan. Bali: Ganesha.
- Zenni, Riana (2014). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Kota Medan.

Lampiran 1 Hasil Analisis Kontribusi

Tahun	Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Kriteria
2014	335.050.333	33.452.301.732	0,010%	Sangat Kurang
2015	391.052.800	44.291.838.476	0,0089%	Sangat Kurang
2016	398.648.905	45.301.480.625	0,0088%	Sangat Kurang
2017	447.038.235	57.571.579.185	0,0078%	Sangat Kurang
2018	494.902.060	57.510.412.874	0,0086%	Sangat Kurang
2019	493.013.370	72.886.984.636	0,0067%	Sangat Kurang

Lampiran 2 Hasil Analisis Koefisien Korelasi Pearson Product Moment

Correlations

		RPK	PAD
RPK	Pearson Correlation	1	.930**
	Sig. (2-tailed)		.007
	N	6	6
PAD	Pearson Correlation	.930**	1
	Sig. (2-tailed)	.007	
	N	6	6

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 3 Biodata

Nama : Ikhlusal Amal
 Tempat/Tgl. Lahir : Latak Ayah, 07 Juni 1999
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Suku : Al-Habsyi
 Alamat : Desa Latak Ayah, Kec. Simeulue Cut, Kab. Simeulue
 Status : Belum Menikah
 No. HP : 0852-6120-9497
 Email : ikhlusal679@gmail.com
 Nama Orang Tua
 Ayah : Eddy Jasir
 Pekerjaan : Petani
 Ibu : Nirmanita
 Pekerjaan : IRT
 Alamat Orang Tua : Desa Latak Ayah, Kec. Simeulue Cut, Kab. Simeulue

Pendidikan Formal

SD Negeri 7 Simeulue Tengah : Lulus Tahun 2012
 SMP Negeri 1 Simeulue Cut : Lulus Tahun 2014
 SMA Negeri 1 Simeulue Cut : Lulus Tahun 2017

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi Tahun 2018-2019.
2. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi Tahun 2019-2020.
3. Komandan Pleton Putra Resimen Mahasiswa Satuan112/Johan Pahlawan Universitas Teuku Umar Tahun 2019-2020.
4. Anggota Komisi Legislasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2021.
5. Kepala Seksi Logistik Resimen Mahasiswa Satuan112/Johan Pahlawan Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2021.
6. Sekretaris Komisi III Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia Wilayah Aceh Tahun 2020-2021.
7. Komandan Resimen Mahasiswa Satuan112/Johan Pahlawan Universitas Teuku Umar Tahun 2021-sekarang.
8. Wakil Asisten Teritorial (WAASTER) Skomen Mahadasa Aceh Tahun 2021-2024.

Prestasi

1. Penerima Beasiswa BIDIKMISI Tahun 2017.

Pendidikan dan Pelatihan

1. Pra Pendidikan Dasar Militer yang diadakan Resimen Mahasiswa Satuan112/Johan Pahlawan Universitas Teuku Umar Tahun 2018.

2. Pendidikan Dasar Militer Resimen Mahasiswa MAHADASA Aceh yang diadakan di Lanud Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar Tahun 2019.
3. Program Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Negara di Provinsi Aceh yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan Provinsi Aceh Tahun 2019.
4. Kursus Dinas Staf Nasional Angkatan Ke-IV yang diadakan Resimen Mahasiswa Batalyon 041/Indra Buana Universitas Riau Tahun 2020.